

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Batam, Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM



NURZALIE, AP, S.Sos

NIP. 19730206 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	7
1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Capaian Renstra	20
3.3 Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	6
---	---

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	7
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam	8
Tabel 3 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	8
Tabel 4 Permasalahan Umum Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	10
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	14
Tabel 6 Capaian Kinerja Tahun 2018	15
Tabel 7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	16
Tabel 8 Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Satrategis 2	17
Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	18
Tabel 10 Capaian Renstra Tahhun 2016-.....	21
Tabel 11 Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016-2021	22
Tabel 12 Realisasi Anggaran Tahun 2018	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakatsesuai dengan kewenangannya.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- d. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada para Kepala Bidang;
- o. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- p. melaporkan akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

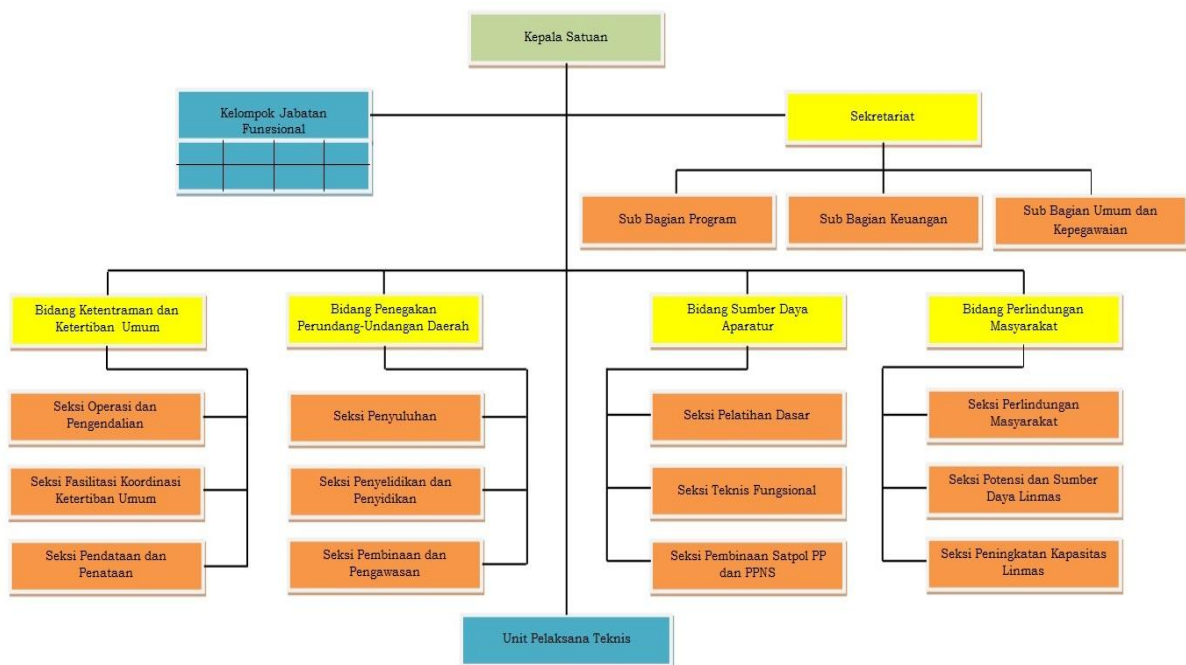
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan membawahi;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;

- 2) Seksi Fasilitasi Koordinasi Trantibum; dan
- 3) Seksi Pendataan dan Penataan
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional; dan
 - 3) Pembinaan Satpol PP dan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Potensi Dan sumber Daya Linmas; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam



1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuh sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memiliki 710 (tujuh ratus sepuluh) orang aparatur yang terdiri dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) PNS dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) orang Non PNS/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2
2	Pembina	IV/a	2	-	2
3	Penata Tk. I	III/d	15	-	15
4	Penata	III/c	9	-	9
5	Penata Muda Tk. I	III/b	11	1	12
6	Penata Muda	III/a	46	2	48
7	Pengatur Tk.I	II/d	9	2	11
8	Pengatur	II/c	99	1	100
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b	23	-	23
10	Pengatur Muda	II/a	8	-	8
11	Juru Tk. I	I/d	2	-	2
12	Juru	I/c	3	-	3
13	Juru Muda Tk. I	I/b	2	-	2
14	Juru Muda	I/a	1	-	1
15	Non PNS/Pegawai Kontrak	-	419	50	469
Jumlah			649	58	707

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	-	6
2	S1	68	3	71
3	Diploma	5	1	6
4	SMA/SMK/Sederajat	141	3	144
5	SMP/Sederajat	5	-	5
6	SD/Sederajat	6	-	6
Jumlah		231	7	238

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 3
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit
2	Bangunan Gedung Kantor	10 Unit
3	Gedung Pos Jaga	4 Unit
4	Bangunan Lainnya	3 Unit
5	Bus	1 Unit
6	Mini Bus	3 Unit
7	Truck	6 Unit
8	Pick Up	3 Unit
9	Sepeda motor	9 Unit
10	Komputer	26 Unit
11	Printer	19 Unit
12	Scanner	1 Unit
13	Faxcimilie	1 Unit
14	AC	17 Unit
15	Mesin Penghancur Kertas	3 Unit
16	Meja Eselon	20 Unit
17	Meja Staf	20 Unit
18	Kursi Eselon	20 Unit
19	Lemari Arsip	10 Unit
20	Filling Cabinet	20 Unit
21	Handy Talky	30 Unit
22	Transceiver UHF Portable	5 Unit

23	Antena VHF/FM Portable	10 Unit
24	Pistol	5 Unit
25	Perisai/Tameng	150 Unit

1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis

1.5.1 Permasalahan Umum

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan umum Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan Kota Batam yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Permasalahan Umum yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	Penegakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran masih kurang

1.5.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu 1) menghadirkan *Clean Government*, 2) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu 1) penanganan ruas jalan strategis nasional dan provinsi, jalan-jalan di kawasan pemukiman maupun ruas jalan non status yang mempunyai nilai strategis dan ekonomi, 2) penanganan perumahan kumuh, penyediaan rumah murah dan Rusun, serta Peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan pemukiman, 3) penyediaan transportasi massal darat dan laut yang murah dan representatif guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah perkotaan dan hinterland, 4) penanggulangan banjir.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing, dengan fokus pada isu 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan Kesehatan masyarakat, 3) pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, 4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,
- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada isu 1) pemenuhan standar ruang terbuka hijau, 2) pengelolaan persampahan, 3) pengelolaan sumberdaya air, 4) pengelolaan limbah secara terpadu, 5) pengurangan efek rumah kaca, 6) penanggulangan potensi resiko kekeringan.
- e. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dengan fokus pada isu 1) kualitas dan daya saing tenaga

kerja, 2) kualitas transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi, 3) akses permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran produk UMKM.

- f. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada isu 1) pengembangan konsep Kota Pintar (Smart city), 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, 3) meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.
- g. Peningkatan kualitas produk kepariwisataan (jasa dan perdagangan sebagai unggulan Kota Batam), dengan fokus pada isu 1) ekowisata bahari, 2) pusat wisata kuliner, 3) wisata historis dan budaya, 4) investasi pariwisata, 5) promosi pariwisata.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.
- b. Penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terutama yang berada di daerah milik jalan guna mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang bernilai strategis dan ekonomi;
- c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang masih harus terus ditingkatkan;
- d. Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016-2021. Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Renja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100% 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan 2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	25 kali 150 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 disajikan berikut ini:

Tabel 6
Capaian Kinerja Tahun 2018

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali	25 kali	100%
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	150 orang	150 orang	100%

3.1.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1:

“Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas”.

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah 1) Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan 2) Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sasaran ini

dicapai melalui dua program dan kegiatan, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kedua program tersebut untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan masing-masing capaian sebesar 100%

Berikut ini adalah capaian kinerja sasaran strategis 1:

Tabel 7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja tahun 2018 ini sama dengan capaian tahun 2017, yaitu 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam baik.

3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2:

“Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban”.

Untuk mencapai sasaran strategis ini Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam melaksanakan 1 (satu) program yaitu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat dan 5 (lima) kegiatan yaitu: 1) Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah; 2) Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam; 3) Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan; 4) Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam; 5) Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	2018			2017		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)	Target (7)	Realisasi (8)	Capaian (9)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali	25 kali	100%	25 kali	25 kali	100%
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	150 orang	150 orang	100%	80 orang	80 orang	100%

a. Jumlah aksi demo yang diamankan

Selama tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lain di lokasi objek vital dan tempat-tempat strategis Pemerintah Kota Batam sebanyak 25 kali, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Kota Batam antara lain TNI dan Polri.

Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2018 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.

Berikut daftar pengamanan aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan di lokasi objek vital dan tempat strategis Pemerintah Kota Batam:

Tabel 9
Jumlah Aksi Demonstrasi Tahun 2018

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Korlap	Jam	Masa
1	16 Januari 2018	Asosiasi Driver Online Kepri	Kantor DPRD Kota Batam	Sopandi	06.00 Wib s/d 18.00	±600 Orang
2	01 Februari 2018	KC-FSPMI BATAM	Kantor Walikota Batam	Alfitoni	09.00 Wib s/d selesai	±300 Orang
3	06 Februari 2018	KC-FSPMI BATAM	Graha Kepri		10.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
4	10 Februari 2018	PAM Abdul Somad	Alun-alun		10.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
5	28 Februari 2018	Aliansi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Batam	Disnaker		08.00 Wib s/d selesai	±2000 Orang
6	08 Maret 2018	Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji (PERSOMET)	Kantor Walikota Batam		10.00 Wib s/d selesai	±100 Orang
7	13 Maret 2018	Aliansi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Batam	Disnaker Kota Batam		14.00 Wib s/d selesai	± 300 Orang
8	02 April 2018	Kesatuan Niaga Seluler Indonesia	Kantor DPRD Kota Batam		10.00 Wib s/d selesai	±100 Orang
9	19 April 2018	Demo Warga Tiban Koprasi	Kantor DPRD Kota Batam		08.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
10	25 April 2018	KC - FSPMI Kota batam	PEMKO BATAM		10.00 Wib s/d selesai	±100 Orang
11	01 Mei 2018	Buruh May Day	Kantor Walikota Batam	Sopandi	10.00 Wib s/d selesai	±200 Orang

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Korlap	Jam	Masa
12	11 Mei 2018	KC - FSPMI Kota batam	PEMKO BATAM	-	09.00 Wib s/d selesai	±150 Orang
13	16 Mei 2018	Penolakan kenaikan tarif listrik	PEMKO BATAM	-	09.00 Wib s/d selesai	±100 Orang
14	25 Mei 2018	Demo Gerakan Masyarakat Peduli Batam	PEMKO BATAM	-	09.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
15	14 Juli 2018	Pam Pawai Takbir	PEMKO BATAM		16.00 wib s/d Selesai	±100 Orang
16	28 Juli 2018	Pam antisipasi Ganti Presiden 2019	PEMKO BATAM		08.00 Wib s/d selesai	±600 Orang
17	02 Agustus 2018	Demo Ojek Online	PEMKO BATAM	-	08.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
18	06 Agustus	Demo warga tiban koperasi Masalah kolam resapan	BP BTM dan Pemko		08.00 Wib s/d selesai	±100 Orang
19	08 Agustus 2018	Gerakan Mahasiswa Kepulauan Riau (GEMA KEPRI)	KANTOR PLN DAN GRAHA KEPRI DAN PEMKO		10.00 Wib s/d selesai	±300 Orang
20	18 Agustus 2018	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Ibnu Sina	KANTOR PLN DAN GRAHA KEPRI DAN PEMKO		08.00 Wib s/d selesai	±50 Orang
21	03 september 2018	anti spasi demo mahasiswa	PEMKO BATAM		08.00 Wib s/d selesai	±120 Orang
22	14 september 2018	Antisipasi demo warga di Kantor Camat Sagulung	Kantor Camat Sagulung		09.00 Wib s/d selesai	±200 Orang

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Korlap	Jam	Masa
23	17 september 2018	demo mahasiswa ibnu sina	BP BTM dan Pemko		09.00 Wib s/d selesai	±300 Orang
24	25 september 2018	Anti Spasi demo pasar	PEMKO BATAM		10.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
25	28 september 2018	Antispasi Demo Driver Gocar	DPRD BATAM		08.00 Wib s/d selesai	±150 Orang

Capaian kinerja tahun 2018 ini sama dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 25 kali dengan tingkat capaian 100%.

b. Jumlah Linmas yang diberdayakan

Selama tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah memberdayakan sebanyak 150 orang Satlinmas dengan tingkat capaian kinerja 100%.Pemberdayaan Linmas ini dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas.

Dibanding tahun 2017, ada peningkatan jumlah Linmas yang diberdayakan.Pada tahun 2017 jumlah Linmas yang diberdayakan hanya 80 orang.Banyaknya jumlah Linmas yang diberdayakan memang tergantung kepada kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam.

3.2 Capaian Renstra

Setelah membahas realisasi dan capaian kinerja, berikut ini akan dibahas realisasi dan capaian kinerja rencana menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

Tabel 10
Capaian Renstra Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	50 kali	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344orang	344orang	344orang	60 orang	80 orang	150 orang

Dari tabel di atas, dapat dilihat target Renstra untuk sasaran strategis 1 telah terealisasi, sedangkan untuk Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja **“jumlah aksi demo yang diamankan”**, realisasinya 50%. Tidak banyaknya aksi-aksi demonstrasi dapat menggambarkan bahwa kondisi umum ketentraman dan ketertiban Kota Batam cukup baik, sedangkan untuk indikator kinerja **“jumlah Linmas yang diberdayakan”** capaian kinerjanya tidak sesuai target. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Batam mengalami defisit anggaran sehingga anggaran lebih diprioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur.

3.3 Perubahan Renstra

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sedang menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-

2021 ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD Kota Batam tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa misi RPJMD Kota Batam, beberapa rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam BAB V RPJMD Kota Batam kurang sesuai. Selain itu, indikator kinerja RPJMD Kota Batam 2016-2021 masih menunjukkan indikator kinerja yang berorientasi output, sedangkan bagi instansi pemerintah setingkat Kota indikator yang wajib ditampilkan adalah indikator kinerja yang berorientasi outcome.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perubahan Renstra tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra Satpol PP Kota Batam Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Survei kepuasan masyarakat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	3. Persentase penurunan pelanggaran K3 4. Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran k3 yang teridentifikasi tahun (n-1) - tahun (n)/jumlah pelanggaran k3 yang teridentifikasi tahun (n-1) x 100 Jumlah pelanggaran perda tahun (n-1) - tahun (n)/jumlah pelanggaran perda tahun (n-1) x 100

Dengan Perubahan Renstra ini, maka indikator kinerja yang ditetapkan telah menunjukkan indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome), dan akan digunakan pada untuk mengukur kinerja pada tahun-tahun berikutnya sampai periode Renstra berakhir.

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 18.919.410.870,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 18.435.102.293,00 (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Persentase realisasi tersebut sebesar 97,44%.

Realisasi anggaran tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Realisasi Anggaran Tahun 2018

		Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1)	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.972.862.870	17.497.049.293	97,35
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1)	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173.913.000	172.763.000	82,09
3		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat			
	1)	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	237.370.000	231.320.000	97,45
	2)	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	203.000.000	202.010.000	99,51

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase
3)	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	160.895.000	160.895.000	100,00
4)	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	122.500.000	122.500.000	100,00
5)	Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas	48.870.000	48.565.000	99,38

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja adalah sebuah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dalam pencapaiannya. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan dan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya, dan bagi *stakeholders* Pemerintah di Kota Batam pada umumnya.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURZALIE, AP, S.Sos

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD RUDI

Jabatan : Walikota Batam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, Oktober 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MUHAMMAD RUDI

NURZALIE, AP, S.Sos

NIP. 19730206 199311 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100% 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan 2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	25 kali 150 orang

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 17.972.862.870,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 173.913.000,00	
3	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Rp 772.635.000,00	

Batam, Oktober 2018

Pihak Kedua

MUHAMMAD RUDI

Pihak Pertama



NURZALIE, AP, S.Sos

NIP. 19730206 199311 1 001